

PERAN AGAMA DALAM PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA YANG PLURALISTIK

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam beberapa pembahasan ilmiah sering dikemukakan keraguan yang cukup gawat tentang peran agama dan agamawan dalam beberapa segi tertentu perkembangan masyarakat. Kecuali tesis Max Weber tentang “Etika Protestan”—yang lalu dicoba untuk diterapkan pada gejala-gejala lain dalam kaitannya dengan agama-agama lain (seperti yang dilakukan oleh Bellah, Geertz, Peter Gran, dan lain-lain)—sedikit saja pembahasan yang mendalam tentang peran positif agama dan agamawan dalam proses perkembangan maju suatu masyarakat atau bangsa.

Keraguan itu diperkuat oleh adanya kesenjangan yang terlalu sering terjadi—dan mudah sekali ditemukan dalam setiap masyarakat—antara ajaran suatu agama dengan tingkah laku atau sikap hidup penganut agama tersebut. Pembelaan diri mereka biasanya berkaitan dengan perbedaan antara “agama” sebagai ajaran dan “pemeluk” sebagai perwujudan hidup dan nyata agama itu.

Pembelaan diri semacam ini tentunya mudah untuk dipatahkan dengan suatu pertanyaan balik sederhana, “Jika agama tidak dapat mempengaruhi tingkah laku pemeluknya, maka apakah arti pemeluk itu?” Namun, kenyataannya ialah banyak orang yang sangat serius memeluk agamanya, tanpa peduli pada tuntutan nyata keyakinannya itu dalam amal perbuatan dan tingkah laku. Baginya, agama adalah “masalah perorangan” dan pengalaman paling berarti

dalam hidup keagamaannya ialah “kepuasan ruhani” yang bersifat sangat individual.

Tetapi, di samping itu, seperti tampak pada berbagai gejala di negara maju (Barat) yang mulai terjadi pengamatan para ahli, ditemukan adanya orang-orang yang memiliki komitmen positif pada masalah sosial, tanpa memedulikan pada keyakinannya. Fraseologinya ialah, “kesalehan tanpa iman (*piety without faith*)”.

Amerika Serikat, karena kenyataan bahwa negeri itu berada di “Dunia Baru” (benua yang baru ditemukan), sering dianggap sebagai sebuah negeri baru. Tetapi, karena dari sudut idenya tentang negara dan masyarakat yang merupakan kelanjutan langsung pengalaman orang-orang Barat, maka dapat dikatakan Amerika Serikat adalah “negeri tua”. Justru di sanalah untuk pertama kalinya cita-cita Barat tentang negara dan masyarakat mulai terlaksana sepenuhnya, sementara di Eropa Barat sendiri, cita-cita itu lama sekali tertindas (misalnya, cita-cita kebebasan beragama, pluralisme dan egalitarianisme).

Sepanjang mengenai Amerika Serikat itu, kita melihat bahwa ungkapan terbaik cita-cita sosial-politiknnya ialah yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaannya, yang disusun oleh Thomas Jefferson, seorang *unitarianist-universalist* yang tidak percaya pada agama formal (saat itu, Kristen). Bahkan Thomas Jefferson meramalkan—ternyata ramalan ini meleset—bahwa agama-agama formal akan hancur dalam satu-dua abad, dan akan digantikan oleh pandangan seperti yang dianutnya, yang ia ramal sebagai agama kemanusiaan masa depan.

Helmut Schmidt, bekas Kanselir Jerman (Barat) dan “dekan” (*dean*) gerakan sosial-demokrat Eropa, dalam kunjungannya ke negeri kita beberapa waktu yang lalu, dengan tegas mengatakan bahwa agama, menurut pengalaman Eropa, adalah musuh nomor satu demokrasi, pluralisme, dan egalitarianisme. Schmidt mengatakan bahwa Eropa Barat ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dulu harus menyudahi peran agama dalam politik. Schmidt, menurut pengakuannya sendiri, adalah seorang pengagum

Pancasila—dan dia hafal sila-sila itu—namun sangat ingin tahu bagaimana merekonsiliasi sila pertama (yang baginya ialah agama) dengan sila keempat (yang baginya adalah demokrasi). Di sini Schmidt kurang memahami bahwa Indonesia lain dari Eropa.

Untuk mengetahui sejauh mana peran positif Islam dalam menaburkan benih-benih sehat untuk tumbuhnya demokrasi, pluralisme, dan egaliteranisme di negara kita, ada baiknya kita mengutip buku petunjuk turisme Indonesia yang sangat lengkap (sebenarnya, malah ensiklopedis) diterbitkan di Singapura. Buku yang disusun dengan menggunakan bermacam-macam sumber ilmiah yang handal ini mempunyai relevansi dengan peran positif agama Islam di Indonesia. Berikut ini kutipan panjang dari buku tersebut:

Indonesia adalah salah satu dari sedikit wilayah yang diislamkan tanpa didahului penaklukkan militer. Pendekatan pertama dan utama (masuknya Islam ini) bersifat psikologis. Islam yang secara radikal bersifat egaliter dan mempunyai semangat keilmuan itu, ketika datang pertama kali di kepulauan ini merupakan konsep revolusioner yang sangat kuat, yang membebaskan orang-orang kebanyakan dari belenggu feodal Hindunya. Sampai datangnya Islam mereka hidup di suatu negeri yang rajanya adalah seorang yang penguasa mutlak, yang dapat merampas tanahnya, bahkan istrinya, kapan saja dia mau. Islam mengajarkan bahwa semua orang itu di hadapan Allah adalah sama-sama dibuat dari tanah. Sehingga tidak dibenarkan adanya pengistimewaan terhadap seseorang sebagai lebih unggul dari yang lain. Dalam Islam tidak ada sakramen ataupun acara-acara inisiasi yang misterius, juga tidak ada kelas Pendeta. Islam memiliki kesederhanaan yang hebat dengan hubungannya yang langsung dan pribadi antara manusia dan Tuhan.¹

¹ Indonesia is one of the few countries where Islam did not supplant the existing religion purely by military conquest. Its appeal was first and foremost psychological. Radically egalitarian and possessing a scientific spirit, when Islam first arrived in these island it was a forceful revolutionary concept that freed the common man from his Hindu feudal bondage. Until Islam arrived, he live in

Dalam Zaman Modern, apa yang dikatakan di atas itu tercermin dengan cukup jelas dalam sejarah cita-cita demokrasi di Indonesia merdeka. Jika kita menelaah sejarah pada dua dasa warsa pertama setelah proklamasi, kita dapatkan bahwa ide-ide tentang demokrasi modern telah banyak diartikulasikan oleh para pemimpin politik dengan latar belakang hidup keagamaan yang kuat. Pada periode pra-pemilu 1955, artikulasi paling baik dan kuat tentang cita-cita demokrasi di Indonesia dilakukan oleh para pemimpin Masyumi, sebuah partai politik Islam yang oleh PKI dan Bung Karno secara tepat disebut sebagai kampion demokrasi liberal, dan yang oleh orang-orang Universitas Cornell disebut partai kaum Muslim modernis, dan khususnya oleh George Mc T. Kahin disebut kaum sosialis Islam.

Yang jelas adalah bahwa Masyumi adalah partai Islam yang kepemimpinanannya didominasi oleh kaum intelektual berpendidikan

a land where the king was an absolute monarch who could take away his land and even his wife at him. Islam, on the other land, taught that all men in Allah's eyes are made of the same clay, that no man shall be set apart as superior. There where no mysterious sacraments or initiation rites, nor was there a priest class. With its direct and personal relationship between man and god, Islam possessed great simplicity. *Everyone* could talk to Allah. Though Mohammed was His only prophet (sic., **yang benar ialah bahwa Islam mengakui semua Nabi dan Utusan Tuhan—NM**) each follower was an equal of Mohammed. Islam is ideally sweated to an island nation; it is a trader's religion which stresses the virtues of prosperity and hard work. It allows for high individual initiative and freedom of movement in order to take advantage of trade opportunities every where. The religion is tied to no locality and God can be worshipped anywhere, even on the deck of a ship. It was, (and is) an easy religion to join. All that was needed was a simple declaration of faith, the *syahadat*, "There is no God but Allah and Mohammed is His only prophet". It compelled a man to bathe and to keep clean, encouraged him to travel out to see the world (to Mecca), and, in short, exerted a democratizing, modernizing, civilizing influence over the peoples of the archipelago. Islam also had a great political attraction. It was first adopted by coastal princes as a counter to the threat of Portuguese and Dutch Christianity, as a rallying point of identity. Islam really caught on in the early 16th century C. as a force against Portuguese colonial domination, then a 100 years later as a force against the Dutch, always spreading just ahead of the foreign overlords. (Al Hickey, *Complete Guide to Indonesia* [Singapore, 1990], h. 8-9).

Barat atau Belanda, seperti Dr. Sukiman Wiryosanjoyo. Dominasi ini semakin besar setelah NU memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952. Kenyataan inilah antara lain yang menerangkan tingginya artikulasi demokrasi yang dilakukan oleh para pemimpin Masyumi. Ini disebabkan karena mereka menguasai idiom-idiom pandangan politik modern berkat pendidikan mereka di Barat. Dan ini pula yang menerangkan mengapa Masyumi menempuh kerja sama politik yang serasi dan erat dengan partai-partai sekuler, seperti PSI, Kristen, Parkindo, dan Katolik. Kerja sama dengan partai-partai sekuler, ini lebih mesra dan lebih erat daripada kerja sama Masyumi (pra-1955) dengan sesama partai-partai Islam, seperti NU, PSII, dan Perti. Namun, setelah tahun 1955, dengan munculnya isu negara Islam di Konstituante membuat semua partai Islam berkoalisi erat. Kerja sama erat Masyumi-PSI-Parkindo-Partai Katolik itu kemudian muncul lagi pasca-1955, yaitu dalam rangka melawan kecenderungan diktatorial dan monolitik (tidak pluralistik, akibat dominasi PKI) dari Bung Karno, dengan eksese negatifyna berupa pergolakan daerah (PRRI-Permesta).

Sekarang ini, yang menjadi halangan utama bagi peran agama yang positif dalam perubahan sosial menuju demokrasi dan pluralisme adalah adanya prasangka-prasangka dan kecurigaan. Sebagian dari prasangka itu tentu tidak berdiri sendiri. Jelas ada yang merupakan akibat dari proses-proses dan struktur-struktur hasil bekerjanya *the invisible hand* sosiologis-psikologis, yang justru menyertai setiap perubahan sosial. Salah satu implikasi (*imperatives*) dari adanya perubahan sosial ialah prasangka—Morris Janowitz. Tetapi, beberapa stereotip tentang golongan tertentu seperti “Islam yang ekstrem kanan” dan “Kristen-Katolik yang konspiratif” sungguh sangat buruk efeknya dalam masyarakat, dan sama sekali tidak menunjang terjadinya proses perubahan sosial yang positif menuju demokrasi dan pluralisme. Stereotip tentang suatu golongan agama yang penuh stigma dan sangat destruktif dapat kita lihat pada berbagai berita yang sering dimuat koran tentang adanya konflik antar-pemeluk agama, seperti yang terjadi

di Irlandia (Katolik dengan Protestan), Libanon (Islam dengan Kristen), Sudan (Kristen dengan Islam), India (Islam dengan Hindu, dan Sheikhisme dengan Hindu), Srilangka (Hindu dengan Budhisme), Burma (Islam dengan Budhisme), Thailand (Islam dengan Budhisme), Filipina (Islam dengan Katolikisme), dan bahkan Amerika (Yahudi, Katolik, Islam, dengan Protestanisme Fundamentalis, seperti *Moral Majority* dan *Southern Baptists*).

Berdasarkan itu semua, dan dalam sikap mengambil hikmah dan pelajaran—sekalipun selalu terdapat kesenjangan antara ajaran suatu agama dengan tingkah laku serta sikap nyata para pemeluknya—tidaklah berarti tertutup sama sekali pintu bagi peranan agama yang positif. Justru jika suatu komitmen—dalam hal ini komitmen pada demokrasi dan pluralisme—agar memperoleh efektivitasnya yang optimal, maka ia harus berakar dan bersumber pada pandangan seseorang atau kelompok tentang apa yang *ultimate*. Jadi, harus ada kaitannya dengan “*problem of ultimacy*”, seperti keyakinan tentang makhluk hidup, “*sangkan paran*” hidup manusia, dan bahkan seluruh alam ini. Para agamawan dapat meneliti kembali berbagai potensi klasik dalam sistem agamanya yang secara sejati mendukung cita-cita terwujudnya masyarakat modern yang demokratis dan pluralistik. Dengan menguasai idiom-idiom dan kemampuan artikulasinya lewat pengalaman pendidikan modern seperti pernah dicontohkan oleh Masyumi pra-1955 tersebut.

Agama dalam Lingkup Budaya Menegakkan Disiplin Nasional

Tegaknya disiplin nasional dalam arti yang seluas-luasnya langsung terkait dengan pandangan hidup yang melihat jauh ke depan dan meliputi dimensi sosial yang luas. Disiplin nasional tidak akan terwujud jika dalam masyarakat tidak cukup banyak orang, walaupun tidak semua orang, memiliki kesadaran dan keinsafan akan dimensi hidup yang tidak hanya menyangkut hari ini, tetapi

juga meliputi masa mendatang. Sebab, sikap berdisiplin dengan sendirinya mengandung semangat perhitungan tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi justru lebih ditekankan untuk kelak kemudian hari.

Sikap disiplin juga mengharuskan adanya keinsafan bahwa hidup seorang pribadi tidak terlepas dari hidup orang banyak. Kesediaan untuk tidak mendahulukan kesenangan diri sendiri—kesediaan ini merupakan unsur amat penting dalam mewujudkan sikap berdisiplin—hanya terjadi jika seseorang mampu melihat bahwa dirinya adalah bagian dari keseluruhan masyarakat, dan bahwa dalam lingkup yang lebih luas serta jangka waktu yang lebih panjang, kesenangan atau kebahagiaan dirinya itu terkait, bahkan tergantung pada kesenangan atau kebahagiaan orang banyak, yaitu keseluruhan masyarakat.

Paduan dari semua faktor tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa disiplin bisa benar-benar tumbuh dan mentradisi hanya jika dikaitkan dan didasarkan pada keyakinan hidup yang menyeluruh dan total, dan jika seseorang menemukan makna hidup—yang menyangkut asal dan tujuan hidup itu—dalam keyakinan tersebut. Sistem keyakinan serupa itu disediakan oleh agama-agama atau ideologi padanan agama seperti komunisme, nazisme, dan bahkan berbagai kultus (*People's Temple*, *Children of God*, *Unification Church*, Bhagwan Shri Rajneesh, Harri Krishna, Jama'ah Tabligh, tarekat-tarekat tertentu, Mbah Suro dan lain-lain)—semuanya menghasilkan perilaku berdisiplin yang tinggi. Itulah sebabnya maka dalam hampir setiap pembicaraan mengenai usaha menegakkan disiplin nasional perlu dikaitkan juga dengan peranan agama dalam memberi tuntunan bagi para pemeluknya untuk berdisiplin. Meskipun tidak dapat dikatakan tentang adanya hubungan satu-satu (*one-to-one relationship*) antara pemeluk suatu agama dengan wujud disiplin pribadi dalam hidup sehari-hari, tetapi secara normatif—sesuai ajaran agama bersangkutan—penganutan suatu agama seharusnya menghasilkan suatu kedisiplinan. Tetapi setiap tinjauan normatif akan dapat menyesatkan, yaitu jika tidak

dikaitkan dengan kenyataan yang sedang dihadapi pemeluknya. Namun, segi normatif itu paling tidak bisa menjadi tumpuan harapan bagi pelaksanaan disiplin ini.

Untuk memperjelas persoalan di atas, ada baiknya terlebih dulu kita telusuri makna kata disiplin itu. Secara etimologis kata “disiplin” (Inggris: “*discipline*”) berarti sesuatu, termasuk sikap dan tindakan yang berkenaan dengan kedudukan seseorang sebagai murid (*disciple*), kebalikan dari “doktrin” (Inggris: “*doctrine*”) yang secara etimologis berarti sesuatu yang berkenaan atau berasal dari guru atau sarjana (*doctor*). Oleh karena itu, dalam kata-kata tersebut, “doktrin” lebih banyak menyangkut teori abstrak, sedangkan “disiplin” lebih banyak menyangkut praktik atau tindakan.²

Dari keterangan etimologis itu tampak bahwa sebenarnya “disiplin” memiliki persamaan atau kesejajaran makna dengan kata-kata “taat”. Hal yang sudah amat jelas itu perlu dikemukakan karena dari sisi itulah kita dapat melihat kaitan langsungnya dengan agama. Dalam bahasa Arab, misalnya, perkataan yang memiliki makna serupa dengan “agama” ialah “*dīn*”. Seperti terbaca dalam kitab suci: “*lak-um dīn-ukum waliy-a dīn* (bagimu *dīn*-[agama]-mu dan bagiku *dīn*-[agama]-ku),” Q 109:6. Dan perkataan “*dīn*” itu berasal dari “*dāna—yadīnu*”, yang artinya antara lain ialah tunduk, patuh, atau taat. Maka agama adalah suatu sistem ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan, atau sistem disiplin. Sehingga sikap tunduk, patuh, dan taat adalah bagian sangat penting dari sikap keagamaan. Dalam hal ini ialah tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan (makna generik perkataan Arab “*islām*”, yang semula digunakan untuk menunjukkan semangat dan kemudian digunakan sebagai nama yaitu khususnya semangat dan nama agama yang dibawa Nabi Muhammad saw.

Dalam agama Islam, bagian dari sikap keagamaan yang seharusnya melahirkan etos disiplin ialah kesadaran akan tanggung

² Lihat *The Compact Edition of the Oxford English Dictionary*, s.v. “*Discipline*”.

jawab pribadi. Yaitu tanggung jawab di hadapan Tuhan dalam pengadilan Ilahi—pengadilan yang digelar pada Hari Pembalasan—atas segala perbuatannya yang baik ataupun yang buruk, besar ataupun kecil, yang dilakukannya di dunia.

Adanya kesadaran akan tanggung jawab pribadi ini berpangkal pada iman, yakni keyakinan akan adanya Tuhan semesta alam. Kemudian keyakinan bahwa Tuhan menghendaki para hamba-Nya untuk bertindak dan bertingkah laku menurut pedoman dan ukuran kebaikan dan kebenaran. Sebab hanya kebaikan dan kebenaran yang mengantarkan seseorang pada berkenan atau rida (Arab: *ridlā*) Tuhan itu.

Landasan keyakinan itu memerlukan sikap takwa. Kata “takwa” itu sendiri kata serapan dari bahasa Arab yang biasa diterjemahkan sebagai sikap “takut kepada Tuhan” atau “sikap menjaga diri dari perbuatan jahat”, atau “sikap patuh memenuhi segala kewajiban dan menjauhi larangan Tuhan”. Meskipun penjelasan itu semuanya mengandung kebenaran, tetapi belumlah merangkum seluruh pengertian tentang “takwa”. “Takut kepada Tuhan” tidak mencakup segi positif “takwa”, sedangkan “sikap menjaga diri dari perbuatan jahat” hanya menggambarkan satu segi saja dari keseluruhannya makna “takwa”. Muhammad Asad, seorang penerjemah dan penafsir al-Qur’an yang terkenal masa kini, menerjemahkan kata “takwa” dengan (dalam bahasa Inggris) “*God consciousness*”, yakni, “kesadaran ketuhanan”. Dan kesadaran ketuhanan sebagai uraian tentang “takwa” sejiwa dengan perkataan “*rabbānīyah*” atau “*ribbīyah*” (semangat ketuhanan) yang dalam Kitab Suci diisyaratkan sebagai tujuan diutusnya para Nabi dan Rasul (Lihat, berturut-turut Q 3:79 dan 146). Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kesadaran atau semangat ketuhanan” itu ialah—seperti dijabarkan Muhammad Asad—kesadaran bahwa Tuhan adalah Mahahadir (*Omnipresent*) dan kesediaan untuk menyesuaikan keberadaan diri seseorang di bawah sorotan kesadaran itu.

Oleh karena itu, persyaratan pertama takwa adalah kepercayaan kepada yang gaib. Tetapi, pengertian “yang gaib” di sini lebih dari-

pada sekadar “yang tak tampak oleh mata” (seperti, “makhluk atau wujud halus” yang meliputi jin, setan, malaikat, surga, neraka, dan lain-lain). Itu semua memang termasuk yang gaib. Tetapi, mengutip Muhammad Asad lagi, “yang gaib” atau “*al-ghayb*” itu mengandung pengertian semua sektor atau fase kenyataan yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Oleh karena itu, keberadaan “yang gaib” ini tidak dapat dikukuhkan atau dibantah melalui pembuktian atau observasi ilmiah, bahkan juga tidak dapat dirangkum (secara memadai) dalam berbagai kategori pemikiran spekulatif, seperti adanya Tuhan dan tujuan yang pasti tentang adanya alam raya ini, kehidupan sesudah mati, hakikat sebenarnya waktu, dan adanya kekuatan-kekuatan spiritual. Hanya seseorang yang yakin bahwa kenyataan tertinggi itu jauh lebih banyak daripada lingkungan kita sendiri yang *observable* (teramati) akan mampu mencapai iman kepada Allah. Orang-orang inilah yang memiliki keyakinan bahwa hidup ini mempunyai makna dan tujuan.³ Oleh karena itu, seseorang bisa menerima kebenaran agama hanya jika dia memiliki iman. Tanpa adanya iman, suatu agama ataupun ajaran kitab suci akan tertutup baginya, yaitu bagi dia yang tidak menerima premis dasar itu.⁴

Dengan adanya iman dan tujuan hakiki hidup yang batas-batasnya melampaui kekinian dan kedisinian, seseorang (seharusnya) tidak mudah terjebak pada dimensi-dimensi jangka pendek perjalanan dan pengalaman hidupnya. Sebaliknya, ia selalu dapat melihat dimensi jangka panjang dan menyeluruh setiap keping tindakannya, yang baik maupun yang buruk. Atau dengan kata lain, ia memiliki kesadaran strategis dan tidak semata-mata taktis; dia melihat setiap tindakannya itu suatu implikasi kosmis dan tidak hanya terbatas pada implikasi terestrial (bumi, dunia; di sini, dan kini) saja.

Dengan mudah kita dapat melihat bahwa kesadaran serupa itu merupakan salah satu persyaratan sangat penting bagi adanya

³ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (London, 1980), h. 4

⁴ *Ibid.*

disiplin. Jika kita ambil contoh bahwa faktor yang gampang merusak rasa disiplin ialah egoisme, sikap mementingkan diri sendiri, dan keserakahan (terlintas dalam pikiran kita gaya banyak orang dalam mengemudikan kendaraan di ibu kota), maka kita dapat melihat bahwa dalam usaha menegakkan disiplin kita sebenarnya berurusan dengan sesuatu yang berakar dalam pribadi masing-masing, namun juga menyangkut dimensi kepentingan yang menyeluruh. Kalau kita renungkan apa sebenarnya hidup ini, maka tidak ada alasan bagi kita hanya mengejar kepentingan kita sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain dan orang banyak. Jadi, jelas sekali bahwa disiplin berkaitan erat dengan kesadaran sosial, sedangkan gaya hidup individualistis atau egoistis merupakan musuh bebuyutannya.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa mengusahakan disiplin itu harus dimulai dengan usaha penanaman kesadaran masing-masing anggota masyarakat bahwa tindakannya (yang berdimensi sosial) tidak hanya mempunyai akibat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota masyarakat ini juga dituntut untuk selalu dapat mempertimbangkan apakah suatu tindakan yang semula tampak menguntungkan diri sendiri itu tidak merugikan orang lain.

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rasa kepedulian terhadap orang lain menuntut adanya pandangan hidup yang menegaskan bahwa melalui pemenuhan kepentingan masyarakat secara meluas, realisasi kepentingan seseorang secara individual dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu berarti masing-masing pribadi (dalam bertindak) tidak mudah terkecoh oleh penampakan lahiriah keuntungan atau perolehan pribadi saja. Dalam konteks ini, disiplin sangat terkait dengan konsep “sabar” (dari bahasa Arab *al-shabr*), yang arti sesungguhnya adalah ketabahan, kesanggupan menahan diri, dan kesediaan untuk tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri yang merugikan kepentingan orang banyak. Sikap untuk tidak mendahulukan kepentingannya sendiri ini timbul karena adanya keyakinan bahwa kepentingan diri sendiri itu akan

terpenuhi dengan lebih baik melalui pemenuhan kepentingan bersama. Jadi, disiplin ini mengharuskan adanya kesediaan masing-masing pribadi untuk menunda kesenangan diri sendiri, dan dengan tabah menunggu atau mengandalkan terwujudnya kesenangan diri sendiri itu melalui terwujudnya kesenangan bersama. Sepintas lalu sikap semacam itu mengesankan sebagai sikap yang bersedia berkorban. Namun, dalam analisa selanjutnya, sikap itu justru akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar, lebih awet, dan lebih hakiki. Dan sikap ini pun sepenuhnya dapat dibenarkan. Dengan kata lain—sebagaimana diungkapkan dalam pepatah Melayu—disiplin menghendaki semangat “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”.

Pepatah Melayu itu sebenarnya memperingatkan kita agar selalu berpikir strategis, jangka panjang, dan jangan hanya berpikir taktis, jangka pendek. Jargon dalam ilmu strategi mengatakan, “*You may lose the battle, but You should win the war*” (Anda boleh kalah dalam pertempuran, tetapi Anda harus menang dalam peperangan). Pertempuran adalah segi taktis, jangka pendek; sedangkan peperangan adalah segi strategis, jangka panjang. Terjemah bebas dalam konteks ini adalah tidak mengapa kita mengalami “kerugian” pribadi karena mendahulukan kepentingan bersama, sebab kita yakin bahwa terwujudnya kepentingan bersama pada akhirnya akan membawa pada “keuntungan” pribadi kita semua. Prinsip ini dengan jelas tampak dalam sikap berdisiplin. Dan memang tujuan dilaksanakannya sikap berdisiplin ini adalah untuk merealisasikan kepentingan bersama secara lebih efektif dan lebih efisien. Karena hanya dengan cara itu pulalah kepentingan-kepentingan pribadi dapat terpenuhi dengan baik.

Tetapi, dari uraian itu juga dapat dilihat adanya kaitan antara disiplin dengan konsep tentang balasan setimpal—terhadap perbuatan baik maupun buruk—yaitu konsep keagamaan tentang “balasan dan dosa”, “*reward and punishment*”. Sebab, ketika seseorang bersedia menunda atau mengorbankan kesenangan atau

kepentingannya sendiri, maka sebetulnya dia mempunyai harapan bahwa pada akhirnya nanti (pada Hari Pembalasan), dia akan mendapatkan balasan dari amalnya ini dan tidak bakal merugi. Ini memang sedikit banyak berdasarkan suatu realisme bahwa manusia pada dasarnya adalah egoistis, ingin melihat kepentingan pribadinya terpenuhi, lambat atau cepat, jangka panjang atau jangka pendek. Maka, *appeal* (pertimbangan) untuk berdisiplin dapat dilakukan pada pribadi-pribadi berkenaan dengan betapa kepentingannya itu akan terpenuhi dengan baik justru melalui ketaatan, kepatuhan, dan sikap tunduk secara suka rela dan penuh keinsyafan pada aturan bersama dan ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat.

Karena adanya keterkaitan dengan masalah “balasan setimpal” itu, maka disiplin tidak bisa dipisahkan dengan masalah penegakan hukum dalam masyarakat. Tertib hukum yang di situ dengan jelas terlaksanakan prinsip “balasan setimpal” akan memberi kerangka institusional pada sikap berdisiplin. Dan tertib hukum itu tidak akan terwujud dengan baik tanpa partisipasi semua anggota masyarakat, dalam semangat “saling mengingatkan tentang kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran”. Sebagai konsekuensinya,—berkenaan dengan masalah disiplin ini—masing-masing anggota masyarakat dapat dengan bebas untuk saling memperingatkan dan saling mengawasi, serta untuk secara bersama memikul beban “penderitaan sementara”, karena yakin bahwa kelak, dalam jangka panjang, kebahagiaan sejati akan terwujud. Seperti kita ketahui, ini adalah salah satu interpretasi ajaran khas agama tentang dunia dan akhirat. [❖]